

**ANALISIS KUALITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)**

**Josua H.R.Lumbantobing  
David P.E. Saerang  
Heince Wokas**

[josua\\_lumbantobing@yahoo.com](mailto:josua_lumbantobing@yahoo.com)

**Abstract**

*This study aimed to analyze the quality of internal government regulatory authorities. A common problem in this study is the finding of the audit that is not detected by the inspectorate apparatus as an internal auditor, but was found by the external auditor, the Supreme Audit Agency (BPK).*

*The method used in this research is descriptive qualitative. As in qualitative research, the authors use the method of in-depth interviews and Forum Group of Discussion with informants who have knowledge related to this research.*

*The results show, that became key points of analysis of internal audit quality authorities Southeast Minahasa regency government is to meet the needs of the Inspectorate competent authorities by providing technical guidance, education and ongoing training to improve quality. Not doing too frequent mutations, mutation should be done in accordance with the competence of the employees. While that is key to improving the quality of the Inspectorate is a strong commitment of the Head of Region for the creation of good and clean government to push for a more active role Inspectorate. The existence of the fulfillment of the budget for the Inspectorate of 1%.*

*This study certainly has limitations that can not be ignored. Therefore, further research is needed as a future research agenda.*

*Keywords: Analysis of The Quality of Government Internal Control Officers, APIP.*

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru. Selama berdirinya Kabupaten ini, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dari tahun 2008 sampai dengan 2012 selalu menghasilkan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*).

Opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*) yang diperoleh selama 5 (lima) tahun berturut-turut tersebut antara lain disebabkan oleh permasalahan yang berulang diantaranya mengenai pengelolaan pajak, pengelolaan belanja barang dan jasa, pengelolaan belanja bantuan dan hibah, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pengelolaan aset tetap, pengelolaan piutang, pengelolaan pendapatan asli daerah, pengelolaan kas, pengelolaan belanja modal, pengelolaan utang, pengelolaan belanja pegawai, dan pengelolaan persediaan.

Sampai dengan bulan Juli 2013 (semester I Tahun 2013) dari 252 rekomendasi diantaranya sebanyak 88 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 48 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi dan sisanya sebanyak 116 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para

pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara”.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Grand Theory: Teori Harapan**

Teori harapan ini sangat berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu motivasi, dimana APIP akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya apabila tujuan dan harapan mereka untuk memperoleh penghargaan atas kinerja yang telah mereka tunjukkan terpenuhi. Penghargaan tersebut dapat berupa anggaran yang diberikan kepada Inspektorat harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas auditor APIP dengan memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur penunjang bagi APIP guna mendukung kegiatan pengawasan keuangan daerah serta peningkatan kesejahteraan bagi auditor APIP. Apabila semua harapan diatas dapat dipenuhi maka bukan tidak mungkin kualitas APIP dapat sedikit demi sedikit meningkat.

### **2.2 Teori Behaviorisme**

Teori behaviorisme berkaitan dengan komitmen yang kuat dari pemimpin lembaga dalam hal ini Bupati dan Inspektur yang memotivasi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya guna terciptanya *clean and good governance* di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sejalan dengan era reformasi, akuntansi sektor publik mulai mendapat perhatian yang serius. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik termasuk pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2009).

### **2.4 Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

### **2.5 Kualitas Pengawasan Internal**

Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

## 2.6 Kompetensi

Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan

## 2.7 Motivasi

Dari berbagai jenis teori motivasi, teori yang sekarang banyak dianut adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Ahli yang mencoba merumuskan kebutuhan-kebutuhan manusia, di antaranya adalah Abraham Maslow.

Maslow merumuskan lima jenjang kebutuhan manusia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (Wahjosumidjo, 1987):

- 1) Kebutuhan mempertahankan hidup (Physiological Needs). Manifestasi kebutuhan ini tampak pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis.
- 2) Kebutuhan rasa aman (Safety Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain adalah kebutuhan akan keamanan jiwa, di mana manusia berada, kebutuhan keamanan harta, perlakuan yang adil, pensiun, dan jaminan hari tua.
- 3) Kebutuhan social (Social Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain tampak pada kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain (sense of belonging), kebutuhan untuk maju dan tidak gagal (sense of achievement), kekuatan ikut serta (sense of participation).
- 4) Kebutuhan akan penghargaan/prestise (esteem needs), semakin tinggi status, semakin tinggi pula prestisenya. Prestise dan status ini dimanifestasikan dalam banyak hal, misalnya mobil mercy, kamar kerja yang full AC, dan lain-lain.
- 5) Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization), kebutuhan ini bermanifestasi pada keinginan mengembangkan kapasitas mental dan kerja melalui seminar, konferensi, pendidikan akademis, dan lain-lain.

## 2.8 Independensi

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Indikator aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang baik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah:

- a. Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang setara.
- b. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.

- c. Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).
- d. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
- e. Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran teoritis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor internal, maka dikembangkan proposisi dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Kompetensi terhadap kualitas APIP

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

#### 2. Motivasi terhadap kualitas APIP

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk menjaga kualitas audit.

#### 3. Independensi terhadap kualitas APIP

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 1988).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara, Forum Group of Discussion (FGD) dan studi kepustakaan.

Maksud dari dipilihnya penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif yaitu agar hasil yang dicapai dari penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi yang baik, jelas, dan berimbang bagi para pembuat keputusan serta untuk mendukung perencanaan di dalam organisasi. Melalui penelitian ini, penulis juga bermaksud untuk menjelaskan bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai badan publik dalam mengusahakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian menjadi evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan prestasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Kompetensi seorang auditor bagai sebuah pedang bagi seorang satria. Semakin tinggi kompetensinya, maka semakin tajam pedang yang dipakainya. Tanpa pedang yang tajam, kecil kemungkinan sang satria akan mampu menebas habis musuh-musuhnya. Tanpa kompetensi yang

memadai, kecil kemungkinan seorang pengawas akan mampu menjalankan tugas dan perannya secara efektif.

Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill), dan Perilaku (attitude). Ungkapan ini tidak banyak berubah sejak masa lalu hingga masa kini. Yang berubah adalah substansi materi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apa yang harus dimiliki agar sesuai kompetensi yang dibutuhkan saat menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan aparat pengawasan intern, perubahan peran, fungsi, serta dimensi penugasan menuntut aparat pengawasan intern untuk selalu mengasah dan meng-update knowledge, skill, dan attitudenya.

Efektivitas kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan (LK) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk menilai efektivitas struktur dan tata kelola yang mendukung fungsi audit dan reviu LK. Salah kriteria yang dibangun adalah bahwa struktur dan tata kelola APIP yang mendukung fungsi audit dan reviu LK harus memadai dengan satu sub kriteria yang digunakan adalah sumber daya pendukung yang memadai. Sumber daya dimaksud adalah jumlah tenaga pengawas (auditor/P2UPD) tersedia dan telah dihitung berdasarkan analisis kebutuhan, kompetensi tenaga pengawas (auditor/P2UPD) sesuai persyaratan dan tenaga pengawasan (auditor/P2UPD) telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara belum memiliki tenaga pengawas yang bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Pada tahun 2011, sebanyak 4 orang pegawai Inspektorat ditetapkan dalam Inpassing jabatan P2UPD, namun sampai saat ini belum diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara sehingga belum dapat diakui sebagai P2UPD.

Pengawasan oleh tenaga pengawas Inspektorat selama ini dilakukan oleh tenaga pengawas yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai kompetensi dimana dinyatakan bahwa Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pada tahun 2010 dan 2011 terdapat penerimaan CPNS untuk formasi auditor sebanyak 5 orang. Penerimaan untuk formasi auditor dimaksudkan untuk ditempatkan pada Inspektorat namun terdapat 2 orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan teknik penempatannya pada kelurahan. Pegawai yang dipindahkan ke Inspektorat tidak mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan fungsi pengawasan. Bahkan dalam satu tim, mulai dari Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah sampai dengan staf pelaksana baru semua, sehingga kinerja tim tidak maksimal. Bagaimana tim bisa bekerja maksimal apabila mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena semua anggota tim baru sehingga entry briefing yang seharusnya dilakukan setiap kali sebelum tim melakukan pemeriksaan/pengawasan tidak berjalan.

Pada Tahun 2012 terdapat dua kali pendidikan dan pelatihan antara lain bimbingan teknis pengawasan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diikuti oleh dua orang pegawai dan Diklat Audit PNPM Mandiri Pedesaan yang diikuti oleh 3 orang pegawai. Sedangkan untuk Tahun 2014 semester III belum ada bimtek-bimtek/diklat-diklat. Selain itu, Inspektorat belum menentukan jumlah jam diklat minimal yang harus dipenuhi oleh para pegawai.

Kebijakan Inspektur memberangkatkan hampir seluruh pegawai di Inspektorat membutuhkan biaya kontribusi diklat yang cukup besar. Kebijakan ini sendiri kurang efektif karena hanya satu kali diklat akan tetapi menggunakan dana yang besar. Seharusnya dana yang digunakan untuk

memberangkatkan seluruh pegawai tersebut bisa digunakan untuk melakukan bimtek atau diklat di Pemkab sebanyak 2-3 kali dengan mendatangkan instruktur dari Jakarta.

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, karena diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, maka independensi Inspektorat itu diragukan. Inspektorat dituntut untuk mengikuti apa maunya Bupati, jika Bupati suruh A, maka Inspektorat harus lakukan sesuai yang Bupati perintahkan.

Independensi aparat pengawas Inspektorat juga tergantung dari kompetensi pengawas itu sendiri. Pengawas yang memiliki kompetensi yang baik hasil dari pembinaan serta pelatihan-pelatihan dengan sendirinya memiliki kode etik yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai auditor. Seorang pengawas (auditor) minimal harus setingkat lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan yang diawasi (auditan), kalau sama maka pengawas dapat dengan mudah ditipu atau dikerjai oleh auditan, karena auditan lebih menguasai apa yang dia kerjakan.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Independensi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemeriksa. Independensi sangat menentukan kredibilitas pemeriksa dan laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh pemeriksa tersebut. Pemeriksa memang harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan untuk memeriksa, tetapi apabila pemeriksa tersebut tidak independen, maka seberapa hebatnya laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan, pada akhirnya pengguna laporan tetap akan meragukan kredibilitas laporan tersebut.

Sedemikian pentingnya independensi, sehingga dapat dikatakan bahwa independensi melekat pada diri pemeriksa yang bersangkutan. Bahkan dapat dikatakan bahwa independensi harus ada terlebih dahulu sebelum pemeriksa itu ada. Pendapat ini tidak berlebihan apabila kita menilik kembali pada latar belakang munculnya penugasan pemeriksaan atau audit dalam konsep stewardship.

Mengingat sedemikian tingginya nilai independensi ini dalam pemeriksaan, maka SPKN sangat bersikap tegas, kalau tidak mau dikatakan keras. Apabila pemeriksa mengalami gangguan independensi, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Minimal, apabila pemeriksa tidak dapat menolak penugasan, gangguan independensi dimaksud harus dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 pada lampiran huruf D Kebijakan Operasional Pengawasan angka 11 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1 (Satu Perseratus) dari APBD Tahun 2009 untuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, pemerintah daerah harus mengalokasikan pemanfaatan anggaran 1% dari total anggaran belanja pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi pada anggaran Inspektorat adalah kurang dari 1% yaitu 0,91% untuk Tahun Anggaran 2012 dan 0,93% untuk tahun anggaran 2013.

Untuk menjaga serta meningkatkan motivasi Inspektorat, Bupati, secara bertahap mulai memperhatikan kesejahteraan para pegawai Inspektorat dengan secara bertahap memenuhi semua harapan Inspektorat guna menghasilkan aparat auditor yang berkualitas sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.

Terkait kendaraan operasional, para tenaga pengawas tidak diberikan fasilitas tersebut. Dalam kegiatan audit, kendaraan yang digunakan adalah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh para tenaga pengawas tanpa diberikan uang sewa kendaraan. Keterangan dari staf pengawas, untuk kendaraan pribadi

yang digunakan dalam kegiatan pengawasan hanya diberikan uang untuk pembelian bahan bakar minyak yang jumlahnya tidak tentu setiap kali pelaksanaan audit.

Inspektorat tidak memiliki sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan fisik pekerjaan seperti komputer, laptop, printer, alat ukur ketebalan aspal (cordrill) dan alat ukur lapisan tembok (hammer test). Sehingga kualitas audit Inspektorat berbeda jauh jika dibandingkan dengan kualitas audit BPK. Inspektorat sudah berusaha mengajukan pengadaan prasarana, akan tetapi tidak pernah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Inspektorat memiliki sarana dan prasarana pendukung audit dengan keterangan kondisi masih baik berupa 2 unit laptop, 8 unit printer, 7 unit Komputer PC, 1 unit proyektor, 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Laptop dikuasai oleh Inspektur dan Sekretaris Inspektorat, komputer dan printer terletak di masing-masing ruangan. Jumlah tersebut masih kurang memadai jika dibandingkan jumlah tenaga pengawas yang ada pada Inspektorat. Keterangan dari para tenaga pengawas diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan audit, para tenaga pengawas menggunakan laptop pribadi dan sebagian tidak menggunakan laptop.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pegawai/Pengawas di Inspektorat tidak dapat menjalankan kegiatan audit dan reviu laporan keuangan secara memadai. Koordinasi antar Tim Pemeriksa Wilayah dalam Pembuatan laporan atas hasil pengawasan yang dilakukan juga menjadi terganggu akibat dari kurangnya infrastruktur yang tersedia sehingga mengakibatkan mereka harus bergantian membuat Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut yang berakibat terlambat selesainya pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat diserahkan kepada auditee sehingga tidak up-to date lagi untuk ditindaklanjuti.

Kamera sebagai salah satu alat minimal yang harus dipunyai Inspektorat baru diadakan di tahun 2014. Terkait dengan perolehan informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru dan hubungan komunikasi dengan pihak luar terkait kegiatan audit dan reviu laporan keuangan, Inspektorat baru memiliki jaringan internet yang sangat penting dalam mendukung kegiatan tersebut di tahun 2014.

Komitmen Bupati dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Inspektorat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pengawas di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat mutlak harus dipenuhi. Komitmen Bupati dapat dilihat dari ketersediaan anggaran yang memadai, pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam menindaklanjuti seluruh laporan hasil pengawasan.

Ketegasan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketegasan itu dapat dilihat dari sikap Bupati apakah berani atau tidak menindak aparat di bawahnya baik itu Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten, para staf ahli, para Kepala Dinas, para Kepala Badan, para Kepala Kantor maupun para Kepala Bagian yang tidak bekerja dengan baik, tidak mampu membenahi pelaporan keuangan SKPD maupun bagian yang dia pimpin serta tidak mampu membereskan setiap temuan-temuan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Hubungan yang harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan sangat penting, supaya bawahan Pada periode Bupati dan Wakil Bupati terdahulu tidak terjalin hubungan yang harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga Wakil Bupati yang pada waktu itu sebagai koordinator pengawasan tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Karenanya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat hanya tertinggal di Inspektorat, tidak diserahkan kepada para Kepala SKPD untuk ditindaklanjuti. Karena tidak ada tindak lanjut maka LHP Inspektorat dianggap BPK tidak ada. Walaupun Inspektur berganti pola kerjanya tetap sama karena LHP dibuat tetapi tetap tidak ada tindak lanjutnya, sehingga kerja Inspektorat menjadi sia-sia. Karena hasil kerja dianggap sia-sia, maka pada saat Inspektur dijabat oleh Joseph Kolompoy sampai dengan Jonas Kalumata, laporan Inspektorat hanya sampai Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

Rapat koordinasi untuk membersihkan setiap temuan yang ada baik temuan BPK maupun temuan aparat Inspektorat sangat diperlukan supaya pengelolaan keuangan setiap SKPD jadi lebih baik dan teratur. Komitmen Bupati membuat pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih baik dengan mengejar opini BPK WTP berusaha diwujudkan dengan menggelar “JSRK (Jumat Siang Rapat koordinasi)” secara rutin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas aparat Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menghasilkan audit yang berkualitas pula. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Kurang dan Belum Mendukung Kegiatan Audit;
- b. Kurangnya pemberian bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada para tenaga pengawas;
- c. Infrastruktur Penunjang dan Pendukung yang Dimiliki APIP Belum Mendukung Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan;
- d. Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat sebagai pendukung kegiatan pengawasan kurang dari 1% dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- e. Komitmen Kepala Daerah terdahulu bagi terciptanya Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang clean and good governance kurang.

### **6.2 SARAN**

- a. Mencukupi kebutuhan jumlah pegawai pada bidang pengawasan dengan apa yang ada sekarang dimaksimalkan, dengan mengikutsertakan para pegawai Inspektorat dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta pendidikan dan pelatihan (diklat) baik itu Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang diadakan oleh BPKP sebagai koordinator maupun jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri (Itjen Depdagri);
- b. Agar Inspektur sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melarang apabila staf pengawasnya baik auditor maupun P2UPD dipindahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, kecuali mereka yang dipromosikan untuk menjabat sekretaris di SKPD lain atau menduduki jabatan eselon 2;
- c. Agar Inspektur menginstruksikan Kepala BKDD dalam melakukan pola mutasi pegawai pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara agar memperhatikan kompetensi pegawai;
- d. Agar Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara lebih cermat dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan;
- e. Agar Bupati Minahasa Tenggara memenuhi anggaran untuk Inspektorat sebesar 1 % dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 secara terus-menerus;
- f. Agar Bupati Minahasa Tenggara terus menjaga serta meningkatkan komitmennya atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik sehingga terciptanya clean and good governance dengan terus melaksanakan program “JSRK (Jumat Siang Rapat Koordinasi)”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afiah, Nunuy Nur. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. *October 2009 Research Days*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.



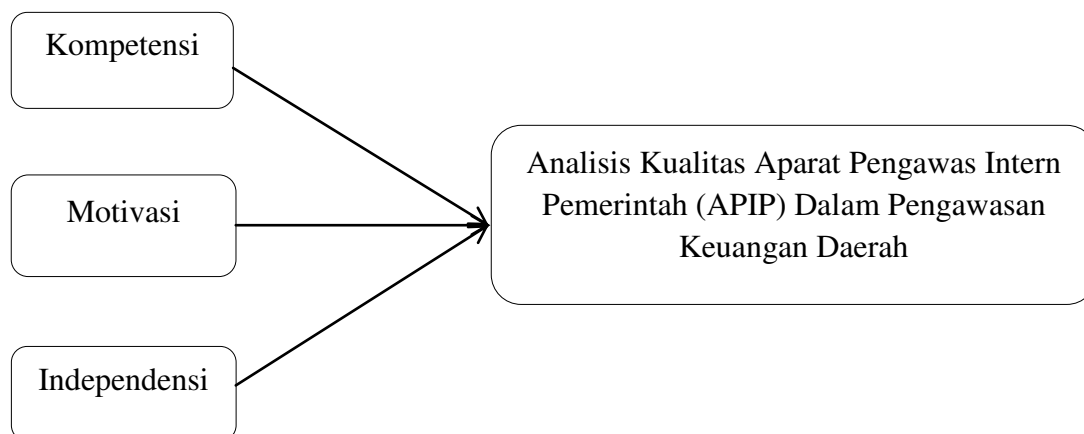
- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar
- Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. *Auditing: An Integrated Approach*. Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Ke dua belas, edisi revisi V. Jakarta : Rineka Cipta
- Ashari, Ruslan. 2011. Pengaruh Keahlian, Independensi, Dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Atkinson, Rita L., dkk. 1999. *Pengantar Psikologi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sobur, Alex. 2009. *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia
- Bedrad, J. dan Michelene, Chi. T.H 1998, Expertise in Auditing of Accounting Practice & Theory.
- Basuki dan Krisna, Y. Mahardani. 2006. "Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya." *Jurnal Manajemen Akuntansi & Sistem Informasi MAKSI UNDIP (Agustus): vol. 6, No. (2), 177-256*.
- Beattie, V., and S. Fearnley. 1995. The Importance of Audit Firm Characteristics and the Drivers of Auditor Change in UK Listed Companies. *Accounting and Business Research* 25:227-239.
- BPK. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012 dan Semester I Tahun Anggaran 2013.
- BPKP. 1998. *Modul Diklat Peningkatan Kemampuan APFP Provinsi DI Yogyakarta*. Unit Pengelola Pendidikan dan Latihan Pengawasan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta.
- Brown. Clifford D. & K. Raghunandan, 1997. *Audit Quality in Audits of Federal Programs by Non-Federal Auditors: A Reply*. *Accounting Horizon Vol.11 No.1*. American Accounting Association.
- Cahyat, A. 2004. Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. *Governance Brief Number 3*
- DeAngelo, LE, 1981, *Auditor Size and Audit Quality*, *Journal of Accounting and Economics* December 1981.
- Deis, D.R dan G.A. Groux. 1992. *Determinants of Audit Quality in The Public Sector*. *The Accounting Review*. Juli. p. 426 – 479.
- Hasbara, Dona M. 2012. Usaha Peningkatan Kualitas Audit yang Dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Skripsi. Fakultas Ekonomi UI.
- Elfarini, Cristina. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNNES.
- Goleman, D. 2001. *Working White Emotional intelligence*. (terjemahan Alex Tri Kantjono W). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Harhinto, T. 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur. *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Ida, Suraida. 2005. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, Vol. 7 No. 3, November 2005: 186-202.
- Kusharyanti. 2003. "Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan topik penelitian di masa datang". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Desember). Hal.25-60
- Lowenshon, S., Johnson E.L., dan Elder J.R. 2005. *Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market*
- Malayu S.P. Hasibuan, (1996), *Organisasi&Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta
- Makmun, A.S., 2003, *Panduan Studi Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 4. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mayangsari, S. 2003. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Suatu Kuasieksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 6 No. 1. Januari
- Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt. 2005. *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis*. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4 Buku 1 & 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Mock, T. J., and M. Samet. 1982. A Multi-attribute Model for Audit Evaluation. *Proceedings of the VI University of Kansas Audit Symposium*, May 20 21, School of Business, University of Kansas. Kansas KS.
- Moekijat. 2002. *Dasar-Dasar Motivasi*, Pioner Jaya, Jakarta
- Efendy, Muh. T. Pengaruh kompetensi independensi dan motivasiterhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta
- Nurbarani, Myrna, Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Peraturan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 05 Tahun 2009. *Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara*. Sulawesi Utara.
- Pramono, E.S. 2003. Transformasi Peran Internal Auditor dan Pengaruhnya bagi Organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 3 No.2 Agustus.
- Pramudito, Agung. 2014. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Terhadap Level Of Reliance Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Kepada APIP. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Keempat.
- Robbins, S.P., T.A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, A. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi* Vol. 7 No. 2. Januari.
- Rustandi, R. Achmad. 1985. *Gaya Kepemimpinan – Pendekatan Bakat Situasional*, PT. Armico, Bandung
- Saifuddin. 2004. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasieksperimen pada Auditor dan Mahasiswa). Semarang. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Samelson, D., Lowenshon, S., and Johnson, L. 2006. *The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government*. *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management*, Vol. 18, No. 2
- Sarundajang, 2004. Pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bidang Pengawasan, Jakarta.
- Schroeder, M., I. Solomon, and D. Vickery. 1986. Audit Quality: The Perceptions of Audit Committee Chairpersons and Audit Partners. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 5 (2):86-94.
- Sososutikno, C. 2003. Hubungan Tekanan Anggaran Waktu dengan Perilaku Disfungsional serta Pengaruhnya terhadap kualitas Audit. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya
- Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol.5 No.1 April 2005.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sukriah, Akram dan Inapty, Akram, dan Inapty. 2009. “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.

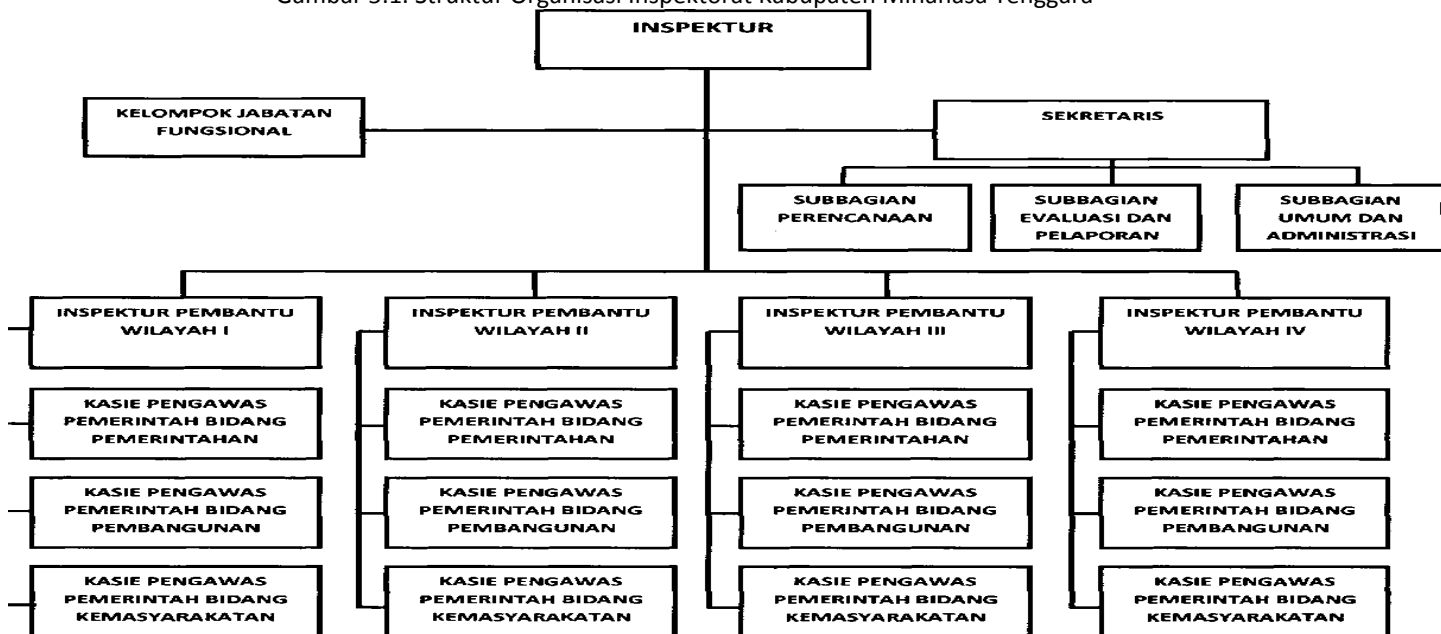
- Sunarsip, 2001, Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Gvernance, *Media Akuntansi*, No. 17/Th. VII.pp. II-VII
- Supriyono, R.A. 1988. Pemeriksaan Akuntan (Auditing) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Surya Dharma,(2005), Manajemen Kinerja; falsafah Teori dan Penerapannya, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Susmanto, Bintang. 2008. Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. <http://www.menkokesra.go.id/content/view/117/323/>
- Sutton, S. G. 1993. Toward an Understanding of the Factors Affecting Audit Quality and the Audit Process. *Decision Sciences* 24 (1):88-105.
- Suwandi. 2005. Pengaruh Kejelasan Peran dan Motivasi Kerja terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Tampubolon, R. 2005. *Risk and Systems-Based Internal Audit*. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta
- Wahjosumidjo. 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Warming-Rasmussen, B., and L. Jensen. 1998. Quality Dimensions in External Audit Services - An External User Perspective. *European Accounting Review* 7 (1):65-82.
- Wibowo,(2007), Manajemen Kinerja, Edisi Dua, Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zawitri, Sari. 2009. Analisis Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Yang Dirasakan dan Kepuasan *Auditee* di Pemerintahan Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

## TABEL DAN GAMBAR

Gambar 3.1  
Kerangka Konseptual



Gambar 5.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara



Tabel 5.1. Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja

Rincian perhitungan pada lampiran

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Yang ada	Selisih
1	Auditor Ahli Utama/P2UPD Utama	1	0	-1
2	Auditor Ahli Madya/P2UPD Madya	2	0	-2
3	Auditor Ahli Muda/P2UPD Muda	6	0	-6
4	Auditor Ahli Pertama/ Auditor Terampil/P2UPD Pertama	18	0	-18
5	Non Auditor/Non P2UPD	0	29	29
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>29</b>	<b>2</b>

Sumber LHP APIP BPK

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2012	72.500.000,00	72.225.000,00	99,62
2013	123.500.000,00	-	-
2014 (semester III)	102.000.000,00	82.500.000,00	80,88

Sumber DPPKAD

Tabel 5.4. Perbandingan Anggaran Pemda dengan Anggaran Inspektorat

No.	Tahun	Anggaran Pemda (Rp)	Anggaran Inspektorat (Rp)	Persentase anggaran Inspektorat pada Pemda (%)
1 .	2012	426.828.954.882,05	3.875.120.938,00	0,91
2 .	2013	462.882.110.146,00	4.295.809.827,00	0,93
3 .	2014	528.937.317.900,00	5.289.373.179,00	1,00

Sumber DPPKAD

**Gambar 5.2. Jaring Laba-Laba antara Kompetensi, Independensi dan Motivasi dalam Hubungannya dengan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah**

